

**PENGARUH INDEPENDENSI DAN *DUE PROFESSIONAL CARE*
TERHADAP KUALITAS AUDIT**
(Studi Empiris Pada BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memproleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*

Oleh

IDA CANDRA PURNAMA SIREGAR
NPM: 1305170432



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

IDA CANDRA PURNAMA SIREGAR. NPM. 1305170432 Pengaruh Independensi *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara). Skripsi 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh independensi dan *Due Profesional Care* Terhadap kualitas audit khususnya dilingkungan Auditor badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provisinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan assosiatif yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dan independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data Primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (Kuesioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai responden dalam penelitian ini. Data Sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Kualitas Audit 2015 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Adapun Sampel yang diajukan adalah 47 orang Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan pengumpulan data dilapangan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai R sebesar 0,574 (57,4%). Penelitian ini menghasilkan tiga penemuan sebagai hipotesis penelitian. Pertama, Independensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit. Kedua *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Ketiga, dapat disimpulkan independensi dan *due professional care* secara bersamaan mempunyai hubungan yang kuat serta berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Kata Kunci : Independensi, *Due Professional Care*, Kualitas Audit

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II : LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	8
1. Teori Keagenen (<i>Agency Theory</i>).....	8
2. Kualitas Audit.....	9
3. Pengetahuan.....	14
4. Independensi.....	15
5. Due Profesional Care	17
6. Lama Hubungan Dengan Klien	19
7. Tekanan dari Klien.....	19
8. Tugas dan Wewenang BPK.....	20
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Konseptual.....	25

	D. Hipotesis.....	29
BAB III :	METODE PENELITIAN	31
	A. Pendekatan Penelitian	31
	B. Defenisi Operasional Variabel	31
	C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
	D. Populasi dan Sampel.....	34
	E. Jenis dan Sumber Data.....	35
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
	G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
	A. Hasil Penelitian.....	43
	B. Analisis Data.....	53
	C. Pembahasan	58
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran-Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	23
2. Defenisi Operasional.....	32
3. Waktu Penelitian.....	33
4. Instrumen Skala Likert	36
5. Jenis Kelamin Responden	43
6. Umur Responden	44
7. Pendidikan Terakhir Responden.....	45
8. Lama Bekerja Responden.....	45
9. Analisis Hasil Uji Validitas Independen.....	47
10. Analisis Hasil Uji Validitas Orifesimal.....	48
11. Analisis Hasil Uji Validitas Kualitas Audit	49
12. Tes of Normality.....	50
13. Coefficients a.....	51
14. Coefficients b.....	54
15. ANOVA	57
16. Model Summary	58

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Konseptual.....	29
2. Scatterplot	53
3. Coefficients b	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas audit adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kualitas audit merupakan hal yang penting karena kualitas audit yg tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. De Angelo (1981) dalam Watkins *et.all* (2004), mendefenisikan kualitas audit sebagai suatu kondisi dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor, sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung pada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut.

Independensi pemeriksaan menurut Simamora (2002), auditor harus tidak memihak dan tidak bias terhadap informasi keuangan yang diauditnya maupun terhadap penyusun dan pemakai laporan keuangan, oleh sebab itu auditor harus independen “dalam kenyataan (*in fact*)” dan “dalam penampilan (*in appearance*)”.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sifat independen dari pemeriksa. Karena itu jika pemeriksa

kehilangan independensinya maka laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurut Elfi Suhayati *due professional care* adalah penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama menekankan tanggung jawab setiap professional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Due professional care sangat penting dalam penentuan kualitas audit, penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama dalam pemeriksaan sangat membantu dalam menentukan kualitas audit. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama dalam menerapkan Standar Pemeriksaan yang digunakan. Keputusan pemeriksa tidak menerapkan standar tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan harus dicatat dalam kertas kerja pemeriksaan. Dalam keadaan demikian, pemeriksa harus mengungkapkan masalah tersebut dalam lingkup pemeriksaan di dalam laporan hasil pemeriksaannya, yaitu tidak dipatuhinya Standar Pemeriksaan yang berlaku, alasan yang mendasarinya, dan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan akibat tidak dipatuhinya Standar Pemeriksaan tersebut.

Sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (1) E UUD 1945 yang menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Jo. Pasal 9E Jo. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya Badan Pemeriksa

Kuangan berwenang/ berkewajiban menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

Badan pemeriksa keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga tinggi negara, memegang peran yang strategis dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Proses penilaian ini dilakukan dengan cara memeriksa laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah yang berupa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Untuk meningkatkan kualitas audit, BPK telah menerbitkan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) sesuai dengan peraturan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia no 1 tahun 2007 dalam kaitannya sebagai pemeriksa eksternal dibidang keuangan negara, auditor BPK dalam melaksanakan tugasnya perlu dilandasi sikap, etika, dan moral yang baik sehingga auditor dapat menjalankan tugasnya dan kewajibannya secara objektif (Anderson dan Ellison, 1986 dalam Aziza, 2008).

Badan Pemeriksa Keuangan Prov. Sumut adalah perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di tingkat daerah yang mempunyai kewenangan memeriksa keuangan daerah Provinsi Sumut dan Kabupaten/Kota di Sumut. Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pemeriksa keuangan daerah Provinsi Sumut dan kabupaten/kota di Sumut terdapat hasil audit BPK Prov. Sumut yang dipertanyakan akan kualitas auditnya.

Kualitas audit yang dihasilkan oleh BPK Prov. Sumut yang dipertanyakan yaitu terkait kasus korupsi Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Pada Desember 2014 BPK Prov. Sumut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2014 yang artinya auditor BPK Prov. Sumut meyakini berdasarkan

bukti-bukti audit yang dikumpulkan dari pemerintah daerah provinsi Sumut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Tak lama setelah pemberian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Prov. Sumut tersebut, Gubernur Sumut pada waktu itu, Gatot Pujo Nugroho ditangkap KPK, dengan berbagai sangkaan korupsi. Antara lain kasus korupsi dana bantuan social, suap kepada anggota DPRD Sumut, untuk persetujuan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2012-2014, Persetujuan Perubahan APBD 2013 dan 2014, Pengesahan APBD 2014 dan 2015, serta Penolakan Hak Interpelasi DPRD tahun 2015. (www.beritagar.id/.2017). Dari kasus ini menggambarkan bahwa hasil audit yang dilakukan oleh BPK prov. Sumut tidak dilakukan secara cermat dan seksama karena dengan adanya temuan dari KPK tersebut menunjukkan adanya kecurangan dalam pengelolaan APBD pemprov Sumut tahun 2014 senilai Rp. 8.4 Triliun.

Pemberian opini wajar tanpa pengecualian terhadap LKPD pemprov Sumut (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2014 yang diberikan BPK Prov. Sumut sebelumnya juga diragukan oleh DPRD Sumut. Keraguan itu diperkuat berdasarkan hasil kunker (kunjungan kerja) tim dewan di-33 kabupaten/kota se-Sumut, masih banyak temuan dan permasalahan, di antaranya banyaknya utang Pemprovsu kepada Kabupaten/Kota baik berupa BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) maupun BHP (Bagi Hasil Pajak). Dari laporan 12 tim kunker, sebagian besar menyarankan pimpinan DPRD Sumut meminta BPK melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap realisasi pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Prov. Sumut tahun 2014, baik proyek SKPD maupun proyek BKP yang dikerjakan Pemkab/Pemko masing-masing. Terkait alokasi dana bagi hasil tahun 2014 untuk Deliserdang, ungkap

Wagirin, hanya terealisasi sebesar Rp. 170.692.729.952, dan 2015 hanya Rp. 141.084.633.757. Angka tersebut sangat jauh dari yang seharusnya dibayarkan ke Deliserdang yaitu Rp301.849.176.447. Karena itu diharapkan ada penambahan alokasi DBH di 2015. (<http://m.detik.com/news/berita/2979253/ironi-wtp-perdana-pemprov-sumut-dan-status-tersangka-gubernur-gatot>).

Permasalahan lain hasil audit BPK prov. Sumut nomor 33.C/LHP/XVIII.MDN/06/2014 terkait dengan perbedaan nilai anggaran proyek penataan pedagang makanan di lapangan Ika Bina Rantau Prapat oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Labuhanbatu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ali Akbar Hasibuan anggota DPRD Kab. Labuhanbatu anggaran nilai proyek tersebut adalah senilai Rp. 176.000.000,00 sedangkan fakta yang ada anggaran sebenarnya adalah senilai Rp. 298.000.000,00. Perbedaan anggaran lain dalam hasil audit BPK Prov. Sumut juga terdapat dalam proyek pembangunan kios produk unggulan daerah di jalan by pass Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Labuhanbatu, data nilai kontrak pada buku ke III buku hasil audit milik BPK Prov. Sumut tersebut bernilai Rp. 199. 000. 000, 00 sedangkan fakta dilapangan nilai kontrak tersebut memiliki pagu anggaran senilai Rp. 722. 000. 000, 00. Dengan adanya perbedaan nilai kontrak pada kedua proyek Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Labuhanbatu tersebut akan mempengaruhi besaran penetapan denda yang mesti dibayarkan pihak rekanan, oleh karena itu Ali Akbar Hasibuan yang juga anggota DPRD Kab. Labuhanbatu mempertanyakan kecermatan dan independensi auditor BPK Prov. Sumut dalam melakukan pemeriksaan proyek di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Labuhanbatu. (www.edisimedan.com)

Hal tersebut diatas, mencerminkan bahwa hasil audit yang dilakukan oleh BPK Sumut tidak atau kurang menerapkan independensi dan sikap kecermatan dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan di Pemprov Sumut dan Kabupaten/Kota di Sumut. Oleh karena adanya permasalahan terkait kualitas audit BPK Prov. Sumut, maka peneliti ingin mengkaji penelitian dengan judul: **“Pengaruh Independensi dan *Due professional care* terhadap Kualitas Audit” (Studi Empiris pada Auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan diuraikan beberapa kasus yang ada, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemberian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan daerah Prov. Sumut dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Prov. Sumut masih diragukan kualitasnya, karena adanya temuan korupsi yang dilakukan oleh KPK.
2. Independensi dan *due professional care* auditor BPK Prov. Sumut masih diragukan, sehingga menyebabkan kurangnya kualitas audit yang dihasilkan BPK Prov. Sumut.

C. Perumusan Masalah

Pada penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?

3. Apakah independensi dan *due professional care* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

- a. Pengaruh independensi berpengaruh terhadap kualitas audit
- b. Pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit Pengaruh independensi dan *due professional care* terhadap kualitas audit

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman, kemampuan intelektual yang mempunyai kontribusi yang berarti perkembangan teori dan praktek khususnya dibidang audit.
- b. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi tentang faktor-faktor yang tidak dapat diabaikan dalam penentuan kualitas hasil pemeriksaan
- c. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam proses pembelajaran di bidang auditing khususnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan di sektor pemerintah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

Landasan teori ini dijelaskan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, serta sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian nantinya.

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan Ng (1978) dalam Mardiyah (2005) mencoba menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemilik serta entitas lain dalam kontrak (misal kreditur) selaku prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktifitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawababan dari agen (manajemen).

Berdasarkan laporan tersebut, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen. Namun yang seringkali terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih dapat dipercaya, maka diperlukan pengujian dan dalam hal itu pengujian tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu auditor independen.

2. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Agusti, Restu dan Nastia Putri. 2013)

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas bahwa auditor akan baik dan benar menemukan laporan kesalahan material, keliru, atau kelalaian dalam laporan materi keuangan klien (De Angelo, 1981 dalam Kusharyanti, 2009).

Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai bagaimana dan apa kualitas audit yang baik itu. Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas jasa secara objektif dengan beberapa indikator. Hal ini dikarenakan, kualitas jasa adalah sebuah konsep yang sulit dipahami dan kabur, sehingga kerap kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya (Parasuraman, *et al.* dalam Nurchasanah dan Rahmanti (2003)). Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian yang menggunakan dimensi kualitas jasa dengan cara yang berbeda-beda. Walaupun demikian, Cheney (1993) dalam Nurchasanah dan Rahmanti (2003) menyatakan bahwa penelitian terhadap kualitas jasa tetap penting mengingat meningkatnya tuntutan konsumen terhadap kualitas jasa yang mereka beli.

Kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Menurut Edwards, *et al.* dalam Bedard dan Michelene (1993) ada dua pendekatan yang digunakan untuk yaitu *outcome oriented* dan *process oriented*. Pendekatan *outcome oriented* digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari

sebuah pekerjaan sudah dapat dipastikan. Untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pendekatan *process oriented* digunakan jika solusi sebuah permasalahan atau hasil dari sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh auditor selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan.

Pengukuran hasil lebih banyak digunakan karena pengukuran proses tidak dapat diobservasi secara langsung sedangkan pengukuran hasil biasanya menggunakan ukuran besarnya audit. Hal tersebut senada dengan Moizer (1997) yang menyatakan bahwa pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan auditor dan kepatuhan pada standar yang telah digariskan.

Dalam Nataline (2007) disebutkan ada sembilan elemen pengendalian kualitas yang harus diterapkan oleh kantor akuntan dalam mengadopsi kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas untuk memberikan jaminan yang memadai agar sesuai dengan standar profesional di dalam melakukan audit, jasa akuntansi, dan jasa *review*. Sembilan elemen pengendalian tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Independensi
Seluruh auditor harus independen terhadap klien ketika melaksanakan tugas. Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah dengan mengkomunikasikan aturan mengenai independensi kepada staf.
- 2) Penugasan personel untuk melaksanakan perjanjian
Personel harus memiliki pelatihan teknis dan profesionalisme yang dibutuhkan dalam penugasan. Prosedur dan kebijakan yang digunakan yaitu dengan mengangkat personel yang tepat dalam penugasan untuk melaksanakan perjanjian serta memberi kesempatan partner memberikan persetujuan penugasan.

- 3) **Konsultasi**
Jika diperlukan personel yang dapat mempunyai asisten dari orang yang mempunyai keahlian, *judgement*, dan otoritas yang tepat. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mengangkat individu sesuai dengan keahliannya.
- 4) **Supervisi**
Pekerjaan pada semua tingkat harus disupervisi untuk meyakinkan telah sesuai dengan standar kualitas. Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah menetapkan prosedur-prosedur untuk *me-review* kertas kerja dan laporan serta menyediakan supervisi pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- 5) **Pengangkatan**
Karyawan baru harus memiliki karakter yang tepat untuk melaksanakan tugas secara lengkap. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah selalu menerapkan suatu program pengangkatan pegawai untuk mendapatkan karyawan pada level yang akan ditempati.
- 6) **Pengembangan profesi**
Personel harus memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawab yang disepakati. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menyediakan program peningkatan keahlian spesialisasi serta memberikan informasi kepada personel tentang aturan profesional yang baru.
- 7) **Promosi**
Personel harus memenuhi kualifikasi untuk memenuhi tanggung jawab yang akan mereka terima di masa depan. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap tingkat pertanggungjawaban dalam kantor akuntan serta secara periodik membuat evaluasi terhadap personel.
- 8) **Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien**
Kantor akuntan publik harus meminimalkan penerimaan penugasan sehubungan dengan klien yang memiliki manajemen dengan integritas yang kurang. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kriteria dalam mengevaluasi klien baru serta *me-review* prosedur dalam kelangsungan kerja sama dengan klien.
- 9) **Inspeksi**
Kantor akuntan harus menentukan prosedur-prosedur yang berhubungan dengan elemen-elemen yang lain yang akan diterapkan secara efektif. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mendefinisikan luas dan isi program inspeksi serta menyediakan laporan hasil inspeksi untuk tingkat yang tepat.

Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Selanjutnya De Angelo (1981) mendefinisikan *audit quality* sebagai probabilitas

(kemungkinan) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Deis dan Giroux (1992) menjelaskan adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya.

Dari pengertian tentang kualitas audit tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Probabilitas auditor untuk melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien tergantung pada independensi auditor. Seorang auditor dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas pekerjaan tinggi, karena auditor mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan termasuk masyarakat (Ermayanti, 2009 dalam Sari, 2011). Lebih lanjut dinyatakan bahwa tidak hanya bergantung pada klien saja, auditor merupakan pihak yang mempunyai kualifikasi untuk memeriksa dan menguji apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis agar hasil audit yang dilakukan oleh auditor berkualitas. Kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor dalam penerapannya adalah untuk menjaga kualitas audit dan

terkait dengan etika (Sari, 2011). SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), yang dikeluarkan IAI tahun 1994 menyatakan bahwa kriteria atau ukuran mutu mencakup mutu profesional auditor. kriteria mutu profesional auditor seperti yang diatur oleh standar umum auditing meliputi independensi, integritas dan objektivitas. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit bertujuan meyakinkan profesi bertanggungjawab kepada klien dan masyarakat umum yang juga mencakup mengenai mutu profesional auditor.

Moizer (1986) dalam Elfarini (2007) menyatakan bahwa pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan oleh auditor dan kepatuhan pada standar yang digariskan. Russel (2000) dalam Sari (2011) menyebutkan bahwa kualitas audit merupakan fungsi jaminan dimana kualitas tersebut akan digunakan untuk membandingkan konsisi yang sebenarnya dengan seharusnya.

Siti kurnia dan Ely Suhayati (2010 : 42) menyatakan bahwa penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan atau kecurangan. Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama (*due professional care*) akan memberikan pengaruh terhadap hasil audit yang dilaporkan oleh auditor.

Abdul Halim (2008:29) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, objektivitas dan integritas. Sedangkan menurut Fearnley dan Page (1994 : 7) dalam Hussey dan Lan (2001) mengatakan bahwa sebuah audit hanya dapat menjadi

efektif jika auditor bersikap independen dan dipercaya untuk lebih cenderung melaporkan pelanggaran perjanjian antara prinsipal (pemegang saham dan kreditor) dan agen (manajer).

3. Pengetahuan

Widhi (2006) menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Adapun SPAP 2001 tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup.

Pengetahuan diukur dari beberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks (Meinhard et.al, 1987 dalam Harhinto, 2004). Harhinto (2004) menemukan bahwa pengetahuan akan mempengaruhi keahlian audit yang pada gilirannya akan menentukan kualitas audit. Secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Kusharyanti, 2003), yaitu: (1) Pengetahuan pengauditan umum, (2) Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Pengetahuan pengauditan umum seperti risiko audit, prosedur audit, dan lain-lain kebanyakan diperoleh diperguruan tinggi, sebagian dari pelatihan dan pengalaman.

Demikian juga dengan isu akuntansi, auditor bisa mendapatkannya dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Pengetahuan

mengenai industri khusus dan hal-hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Murtanto dan Gudono (1999) dalam Elfarini (2007) menjelaskan terdapat dua pandangan mengenai keahlian. Pertama, pandangan perilaku terhadap keahlian yang didasarkan pada paradigma *einhorn*. Pandangan ini bertujuan untuk menggunakan lebih banyak kriteria objektif dalam mendefinisikan seorang ahli. Kedua, pandangan kognitif yang menjelaskan keahlian dari sudut pandang pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung (pertimbangan dibuat di masa lalu dan umpan balik terhadap kinerja) dan pengalaman tidak langsung (pendidikan).

4. Independensi

Upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara, mulai dijalankan pasca krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1999. Melalui agenda serangkaian paket perundang-undangan mengenai keuangan negara yang terdiri dari Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara yang memuat nilai penting dalam usaha meningkatkan kontrol terhadap penggunaan keuangan negara. Nilai yang dimaksud salah satunya adalah independensi dalam menjalankan fungsi auditatif. Independensi BPK tidak hanya menyangkut kebebasan dari segi organisasi yang secara formal adalah berada di luar lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif dalam sistem pemerintahan. Namun, independensi BPK juga tercermin dalam hal independensi

personilnya dalam pengambilan keputusan, independensi dalam bidang keuangan serta anggaran, dan yang lebih penting adalah kebebasan BPK dalam menjalankan fungsi pemeriksaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan kepada publik.

Rangkaian kegiatan pemeriksaan menjadi perhatian dalam penelitian, mengingat kegiatan pemeriksaan adalah urgensi dari fungsi BPK itu sendiri sebagai lembaga yang memiliki fungsi pemeriksaan dan keuangan negara untuk mewujudkan nilai transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara. Karena jika dalam rangkaian kegiatan pemeriksaan BPK masih dibayang-bayangi dengan masalah intervensi dan pengaruh dari pihak manapun maka sejarah tidak berfungsinya BPK di masa lalu tepatnya di masa Orde Baru akan terulang.

Meskipun BPK diperbolehkan memeriksa sumber-sumber penerimaan negara/daerah, akan tetapi hasil laporan pemeriksaan BPK tersebut harus dibahas terlebih dulu dengan pemerintah dan isinya pun disesuaikan dengan keinginan pemerintah agar tidak “mengganggu stabilitas politik”. Hal tersebut menjadi penegas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di masa Orde Baru sesuai dengan pribahasa “ Bagai Kerbau Dicusuk Hidungnya” yang menggambarkan BPK tidak ubahnya hanyalah alat pemerintah demi kepentingan tertentu.

Penelitian mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Lavin (1976) dalam Elfarini (2007) meneliti 3 faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik, yaitu: (1) Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) Pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien, dan (3) Lamanya hubungan antara akuntan publik dengan klien. Shockley

(1981) dalam Elfarini (2007) meneliti 4 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu (1) Persaingan antar akuntan publik, (2) Pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien, (3) Ukuran KAP, dan (4) Lamanya hubungan audit. Menurut Donald dan William (1982) dalam Harhinto (2004) independensi auditor independen mencakup dua aspek, yaitu :

- 1) Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya
- 2) Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa auditor independen bertindak bebas atau independen, sehingga auditor harus menghindari keadaan yang dapat menyebabkan masyarakat meragukan kebebasannya

Supriyono (1988) dalam Elfarini (2007) meneliti 6 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu: (1) Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) Jasa-jasa lainnya selain jasa audit, (3) Lamanya hubungan audit antara akuntan publik dengan klien, (4) Persaingan antar KAP, (5) Ukuran KAP, dan (6) *Audit fee*.

5 *Due professional care*

Menurut PSA No. 4 SPAP (2001) dalam Aulia (2013), *due professional care* adalah kecermatan dan keseksamaan yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut, serta berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan

dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Singgih dan Bawono (2010) dalam Putri (2013) mendefinisikan *due professional care* sebagai kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional.

Menurut Elfi Suhayati *due professional care* adalah penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. (Elfi Suhayati. 2010)

Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor pada dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar. Untuk itu auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai dalam mengevaluasi bukti audit. Menurut Singgih dan Bawono (2010) sikap *due professional care* dapat dipengaruhi oleh 2 aspek yaitu aspek struktural dan aspek sikap. Aspek struktural merupakan bagian dari pelatihan-pelatihan, asosiasi profesional, dan kode etik profesi.

Sedangkan aspek sikap berkaitan dengan sikap yang menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya serta pembentukan jiwa profesionalisme auditor. Febriyanti (2014) menyatakan bahwa IAI atau IIA melihat ada lima indikator yang digunakan untuk mengukur *due professional care* antara lain yaitu:

- 1) Menggunakan kecermatan dan keterampilan dalam bekerja
- 2) Memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab
- 3) Kompeten dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas
- 4) Adanya kemungkinan terjadi kesalahan, ketidakteraturan dan ketidakpatuhan

5) Waspada terhadap resiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi objektivitas

6 Lama Hubungan dengan Klien (*Audit Tenure*)

Di Indonesia, masalah *audit tenure* atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.O6/2002 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama. Terkait dengan lama waktu masa kerja, Deis dan Giroux (1992) dalam Elfarini (2007) menemukan bahwa semakin lama audit tenure, kualitas audit akan semakin menurun. Hubungan yang lama antara auditor dengan klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas pada apa yang telah dilakukan, melakukan prosedur audit yang kurang tegas dan selalu tergantung pada pernyataan manajemen.

7. Tekanan dari Klien

Pelaksanaan fungsi auditor, sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Goldman dan Barlev (1974) dalam Harhinto (2004) berpendapat bahwa usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan kliennya. Klien dapat dengan mudah mengganti auditornya dibandingkan bagi auditor untuk mendapatkan sumber *fee* tambahan atau alternatif sumber lain (Nichols dan Price, 1976 dalam Hartinto, 2004).

Kondisi keuangan klien juga berpengaruh terhadap kemampuan auditor untuk mengatasi tekanan klien (Knapp, 1985 dalam Harhinto, 2004). Klien yang mempunyai

kondisi keuangan yang kuat dapat memberikan *fee audit* yang cukup besar dan juga dapat memberikan fasilitas yang baik bagi auditor. Pada situasi ini auditor menjadi puas diri sehingga kurang teliti dalam melakukan audit. Kualitas audit yang baik dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa, auditor harus berpedoman pada kode etik, standar profesi dan akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya (Khomiyah dan Indriantoro, 1998 dalam Elfarini (2007)).

8. Tugas dan Wewenang BPK RI

a. Tugas BPK

Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas, pernyataan ini tercantum dalam UUD 1945. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden. Dalam pembentukannya, lembaga ini memiliki sejarah tersendiri dan juga dimaksudkan untuk memiliki tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan yang seperti pada uraian di bawah ini.

Dalam pasal 23 Ayat (5) Tahun 1945 telah ditetapkan bahwa untuk pemeriksaan tanggung jawab yang berhubungan dengan Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan dimana peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian hasil pemeriksaan keuangan tersebut disampaikan kepada DPR.

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam UUD tahun 1945 tersebut, kemudian dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 yang berisi

tentang pembentukan Badan Pemeriksaan Keuangan. Pada awalnya BPK mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1947 dan memiliki kedudukan sementara di Magelang. Pada saat pembentukan ini, BPK memiliki 9 orang pegawai yang diketuai oleh R. Soerasno.

Tugas dan wewenang Badan Pengawas Keuangan disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan kedua. Tugas BPK menurut UU tersebut masuk dalam bagian kesatu, isinya antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.
2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.
4. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku.
5. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
6. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

b. Wewenang BPK

Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 BAB III bagian kedua diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut.
2. Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan.
3. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK.
4. BPK berwenang memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.

Masih banyak tugas dan wewenang BPK yang lain berdasarkan UU RI Nomor 15 Tahun 2006 yang bersifat sangat rinci dan teliti. Selebihnya peraturan tersebut diatur sendiri oleh BPK demi kelancaran dan keefektifan kinerja dari BPK tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1	Deva Aprianti (2010)	Pengaruh kompetensi, independensi dan keahlian professional terhadap kualitas audi..	Variabel independensi dan keahlian professional	Variabel kompetensi	Berpengaruh signifikan dari variabel kompetensi, independensi dan keahlian professional terhadap kualitas audit.
2	Annisa Desty Puspatriani (2016)	Pengaruh independensi dan <i>due professional care</i> terhadap kualitas audit	Variabel independensi dan <i>due professional care</i>	Lokasi penelitian di KAP Kota Bandung	Independensi dan <i>due professional care</i> memiliki pengaruh terhadap kualitas audit
3	Fransiska dan Betri (2014)	Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit.	Sumber data kuesioner. - Variabel independensi	- Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. - Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik yakni uji T dan uji F dengan program SPSS 17.0. - Variabel etika auditor.	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel etika auditor yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel lainnya seperti independensi, pengalaman kerja, dan kompetensi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
4	Pratiwi, dkk. (2013)	Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor pada Kualitas Audit dengan <i>Due professional care</i> sebagai	Variabel independensi dan <i>due professional care</i> . - Sumber data kuesioner	- Analisis data yang digunakan adalah Uji <i>Partial Least Square</i> (PLS). - Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor di KAP se-Provinsi Bali.	Hasil uji PLS pada <i>path coefficients</i> menunjukkan independensi berpengaruh pada kualitas audit melalui <i>due professional care</i> .

		variabel intervening di (KAP) se- Provinsi Bali			
5	Herawaty, dkk. (2012)	Pengaruh Independensi, Pengalaman, <i>Due professional care</i> dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit	-Variabel independensi, dan <i>due professional care</i> . -Metode pengumpulan data melalui kuesioner. -Jenis penelitian kuantitatif	-Variabel dependen yang berbeda adalah akuntabilitas -Populasi penelitian adalah auditor di KAP Jambi dan Palembang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, pengalaman, dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas audit secara berkelanjutan. Sedangkan <i>due professional care</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, merupakan suatu penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Dari kedilaman penelitian terdahulu tentunya memiliki perbedaan, namun permasalahannya adalah independensi dan profesionalisme tentang audit

C. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh independensi suatu lembaga termasuk BPK. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas audit salah satunya adalah independensi. Abdul Halim (2008:29) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, objektivitas dan integritas. Sedangkan menurut Fearnley dan Page (1994 : 7) dalam Hussey dan Lan (2001) mengatakan bahwa sebuah audit hanya dapat menjadi efektif jika auditor bersikap independen dan dipercaya untuk lebih cenderung

melaporkan pelanggaran perjanjian antara prinsipal (pemegang saham dan kreditor) dan agen (manajer).

Berdasarkan defenisi di atas dapat dipahami bahwa audit hanya dapat menjadi efektif apabila auditor bersikap independen dan dipercaya untuk lebih cenderung melaporkan pelanggaran perjanjian antara principal.

Kemudian Eunike (2007) menyatakan bahwa Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Defenisi di atas memberikan gambaran bahwa independensi adalah suatu sikap netral atau ketidak berpihakan terhadap sesuatu yang dalam hal ini tentunya akuntan public harus bersikap independen dalam melakukan pemeriksaan atau dalam pelaksanaan audit, dengan independensi suatu lembaga audit maka akan terjaga efektivitas dan kualitas audit itu sendiri. Oleh karena itu cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan jika seorang auditor bersikap independen, maka penilaiannya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah laporan keuangan yang diperiksa. Jadi, semakin tinggi independensi seorang auditor maka hasil audit yang dihasilkannya juga akan semakin berkualitas.

2. Pengaruh *Due professional care* Auditor Terhadap Kualitas Audit

Selain independensi *due professional care audit* juga berpengaruh terhadap kualitas audit. Adapun pengaruh *due professional care audit* terhadap kualitas audit dapat diuraikan sebagaimana pernyataan Indra Bastian (2007:19) menyatakan bahwa audit internal yang memiliki kecakapan teknis dan keahlian professional akan menghasilkan laporan yang berkualitas.

Kutipan di atas dapat dipahami bahwa audit internal yang berkualitas adalah audit yang memiliki kecakapan tekni dan keahlian professional, dengan kualitas tersebut maka dengan sendirinya akan mempengaruhi terhadap kualitas audit itu sendiri.

Kemudian (Simamora, 2002 : 29) menyatakan bahwa kemahiran profesional auditor yang cermat dan seksama menunjukkan kepada pertimbangan professional (professional judgment) yang dilakukan auditor selama pemeriksaan. Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa kemahiran professional auditor adalah auditor yang akurat, cermat dan seksama dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan kemahiran professional auditor yang cermat dan seksama (*due professional care*) akan berdampak terhadap baik atau tidaknya kualitas audit yang dilaporkan.

Selain itu Siti kurnia dan Ely Suhayati (2010 : 42) menyatakan bahwa penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan atau kecurangan. Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama

(*due professional care*) akan memberikan pengaruh terhadap hasil audit yang dilaporkan oleh auditor.

Hal ini diperkuat dengan adanya hasil penelitian Kopp, Morley, dan Rennie dalam Mansur (2007 : 38) yang membuktikan bahwa masyarakat akan mempercayai laporan keuangan jika auditor telah menggunakan sikap skeptis profesionalnya (*professional skepticism*) dalam proses pelaksanaan audit. Auditor harus tetap menjaga sikap skeptis profesionalnya selama proses pemeriksaan, karena ketika auditor sudah tidak mampu lagi mempertahankan sikap skeptis profesionalnya, maka laporan keuangan yang diaudit tidak dapat dipercaya lagi, dan memungkinkan adanya litigasi paska audit. Kemudian Nearon (2005) dalam Mansur (2007) juga menyatakan hal serupa bahwa jika auditor gagal dalam menggunakan sikap skeptis atau penerapan sikap skeptis yang tidak sesuai dengan kondisi pada saat pemeriksaan, maka opini audit yang diterbitkannya tidak berdaya guna dan tidak memiliki kualitas audit yang baik. Dengan demikian, dapat di tarik kesimpulan bahwa *due professional care* mempunyai hubungan terhadap kualitas audit.

Kualitas audit sebagai kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (De Angelo, 1981 dalam Reviyana Endriyani, 2012). Standar Profesional Auditor BPK yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Audit BPK menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas, apabila memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

3. Independensi dan *Due professional care* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualita Audit

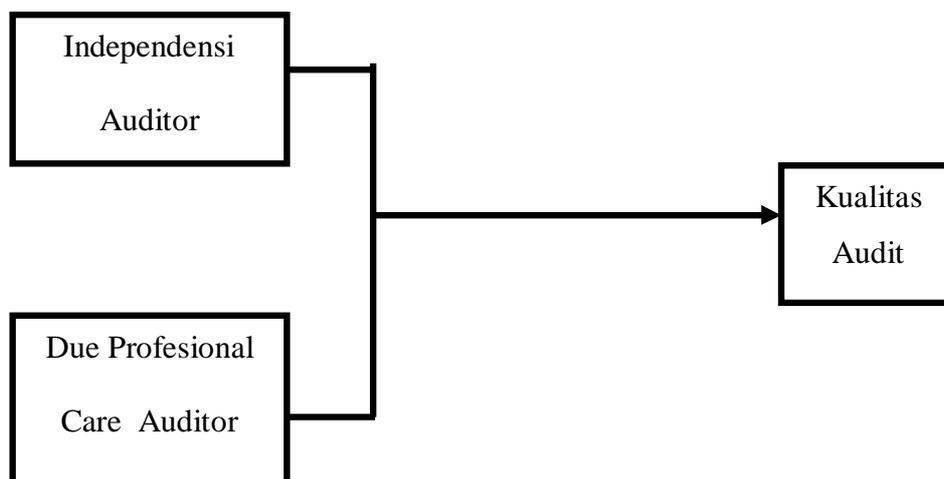
Eunike (2007) menyatakan bahwa Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Oleh karena itu cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan jika seorang auditor bersikap independen, maka penilaiannya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah laporan keuangan yang diperiksa. Jadi, semakin tinggi independensi seorang auditor maka hasil audit yang dihasilkannya juga akan semakin berkualitas.

Siti kurnia dan Ely Suhayati (2010 : 42) menyatakan bahwa penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan atau kecurangan. Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama (*due professional care*) akan memberikan pengaruh terhadap hasil audit yang dilaporkan oleh auditor.

Dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan proses audit, seorang pemeriksa membutuhkan pengetahuan di bidang audit dan pengalaman yang baik karena dengan kedua hal itu seorang pemeriksa/auditor menjadi lebih mampu memahami kondisi

keuangan dan laporan keuangan yang akan di auditnya. Kemudian dengan sikap independensi dan *due professional care* maka seorang pemeriksa dapat melaporkan dalam laporan hasil pemeriksaan jika terjadi adanya kelemahan-kelemahan dan pelanggaran.

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, penelitian mengidentifikasi dua variabel independen yaitu independensi dan *due professional care* pemeriksa yang diperkirakan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pengaruh independensi terhadap kualitas audit auditor pada BPK Provinsi Sumatera Utara.

- 2) Adanya pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit auditor pada BPK Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Adanya pengaruh independensi dan *due profesional care* secara bersama-sama terhadap kualitas audit auditor pada BPK Provinsi Sumatera Utara

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Situmorang dan Ginting, 2008 : 57). Penelitian asosiatif ini bersifat hubungan (simetris, kausal atau timbal balik) antara dua variabel atau lebih untuk menjelaskan adanya pengaruh Independensi (X1), *Due professional care* (X2), terhadap variabel Kualitas Audit (Y).

B. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi oprerasional dari masing-masing variable pada penelitian ini adalah:

Tabel III.1

Defenisi Operasional

Jenis Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
A. Dependen:			
Kualitas Audit (Y)	Pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi pemeriksa ssesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Agusti, Restu dan Nastia Putri. 2013)	a. Laporan hasil pemeriksaan memuat adanya kelemahan pengendalian intern; b. Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum; c. Laporan hasil pemeriksaan diberikan kepada entitas dan pihak yang bertanggung jawab untuk	Likert

		<p>melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan;</p> <p>d. Ekspose hasil pemeriksaan;</p> <p>e. Tindak lanjut dari rekomendasi. (Agusti, Restu dan Nastia Putri. 2013)</p>	
B. Independen:			
Independensi (X1)	<p>Setiap aparat pemeriksa harus memiliki sikap tidak memihak kepada siapapun, dan menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya (Donals dan William.1982)</p>	<p>a. Pemeriksa tidak memiliki hubungan yang dekat dengan pihak yang diperiksa;</p> <p>b. Tidak ada pembatasan waktu yang tidak wajar dalam pemeriksaan;</p> <p>c. Menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil audit. (Donals dan William.1982)</p>	Likert
<i>Due professional care</i> (X2)	<p>Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama menekankan tanggung jawab setiap professional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (Elfi Suhayati. 2010)</p>	<p>a. Memiliki kecermatan audit;</p> <p>b. Memeriksa secara seksama;</p> <p>c. menekankan tanggung jawab setiap professional. (Elfi Suhayati. 2010)</p>	Likert

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Auditor BPK Perwakilan Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.22 Medan. Penelitian ini dilakukan pada Auditor

BPK Perwakilan Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2017.

Tabel III.2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2017					
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1	Pengajuan Judul						
2	Penulisan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Penulisan Skripsi						
5	Sidang Meja Hijau						

D. Populasi Dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:115). Populasi dalam penelitian ini adalah auditor pemerintah di BPK Perwakilan Sumatera Utara yang berjumlah 98 orang Auditor.

2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:116). Dalam suatu penelitian, seringkali

penulis tidak dapat mengamati seluruh individu dalam suatu populasi. Hal ini dapat dikarenakan jumlah populasi yang terlalu besar bagi penulis. pemilihan sampel dengan metode yang tepat dapat menggambarkan kondisi populasi sesungguhnya yang akurat, dan dapat menghemat biaya secara efektif, dengan berbagai keterbatasan penulis maka dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2008:78), yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Ukuran populasi

e = Taraf Kesalahan (*Standart error*)

Populasi (N) berjumlah 91 orang, sehingga jumlah sampel adalah:

$$n = \frac{91}{1+91(0.1)^2} = \mathbf{47.39}$$

Jumlah sampel yang didapat sebesar 47,39 dibulatkan menjadi 47 orang. Jadi, berdasarkan Rumus Slovin jumlah sampel yang dapat diambil sebanyak 47 orang, sedangkan metode pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata atau bagian yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2012:118)

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2003) terdapat beberapa jenis penelitian antara lain : penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang diambil oleh

penelitian adalah penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah :Data primer dan data sekunder.

1. Menurut Uma sekaran (2011) data primer adalah data pokok atau data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel untuk tujuan spesifik studi. Data primer yang digunakan adalah kuesioner yang disebarakan kepada beberapa responden.
2. Data sekunder yaitu data pendukung dalam penulisan skripsi ini. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literature, buku, majalah, internet, dokumentasi dan berbagai bahan bacaan lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Kuisisioner yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012:199) dalam penelitian ini kuisisioner akan diberikan kepada responden atau auditor di BPK Prov. Sumut sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) orang. Instrumen penelitian dapat diavaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Pengujian tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument.

Tabel III.3
Instrumen Skala Likert

No	Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu-Ragu (RG)	3
4	Kurang Setuju (KS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

a. Uji Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Jadi pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrument dalam menjalankan fungsi. Instrument dikatakan valid jika instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono (2008:363)).

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan kuisioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Pengujian validitas instrument dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Nilai validitas dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation. Jika ada angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik (r hitung $>$ r table) maka instrument tersebut dikatakan valid. Rumus statistic untuk pengujian validitas adalah:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 47 orang dengan 11 pertanyaan. Berdasarkan jumlah pertanyaan 10 soal valid dan 1 soal tidak valid, maka nilai r-tabel dapat diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = $n - k$. k merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel. Jadi $df = 47 - 11 = 36$, maka r tabel = 0,329. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r hitung yang merupakan nilai dari corrected item total correlation > dari r tabel.

Berikut ini hasil uji validitas sebagai berikut :

Untuk mengetahui valid tidaknya angket atau pernyataan yang diajukan kepada responden maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas soal, dari 12 pertanyaan maka yang valid 11 soal dan 1 soal tidak valid..

Tabel III.4:

Analisis Hasil Uji Validitas Independensi

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Validitas
1	.869	0,329	Valid
2	.791	0,329	Valid
3	.814	0,329	Valid
4	.909	0,329	Valid
5	.842	0,329	Valid
6	.826	0,329	Valid
7	.909	0,329	Valid
8	.680	0,329	Valid
9	.318	0,329	Tidak Valid
10	.746	0,329	Valid
11	.744	0,329	Valid
12	.765	0,329	Valid

Tabel 3.4 di atas dapat dilihat hasil uji validitas variabel independensi, yang menunjukkan bahwa masing-masing indikator variabel yang telah diuji dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} (0,05). Dari tabel pengujian diketahui bahwa sepuluh pernyataan dinyatakan valid dan telah memenuhi syarat validitas artinya 11 pernyataan relevan digunakan sebagai indikator independensi sedangkan satu pertanyaan tidak relevan.

Selanjutnya untuk X_2 dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 47 orang dengan 10 pertanyaan. Berdasarkan jumlah pertanyaan 9 soal valid dan 1 soal tidak valid. Terhadap variabel Due profesional care (X_2) dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 47 orang, maka nilai r-tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = $n - k$. k merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel. Jadi $df = 47 - 9 = 38$, maka $r_{tabel} = 0,320$. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r_{hitung} yang merupakan nilai dari corrected item total correlation > dari r_{tabel} . Dari hasil output di atas maka dapat dilihat semua pertanyaan yang diajukan tentang due profesional care (X_2) memiliki kevaliditasan yaitu di atas nilai 0,320. Sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.5:
Analisis Hasil Uji Validitas Profesional

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Validitas
1	.698	0,320	Valid
2	.782	0,320	Valid
3	.778	0,320	Valid
4	.984	0,320	Valid
5	.543	0,320	Valid
6	.667	0,320	Valid

7	.776	0,320	Valid
8	.696	0,320	Valid
9	.289	0,320	Tidak Valid
10	.676	0,320	Valid

Tabel III.5 di atas dapat dilihat hasil uji validitas variabel profesional, yang menunjukkan bahwa masing-masing indikator variabel yang telah diuji dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} (0,05). Dari tabel pengujian diketahui bahwa 9 pernyataan dinyatakan valid dan telah memenuhi syarat validitas artinya ke-9 pernyataan tersebut relevan digunakan sebagai indikator independensi sedangkan satu pertanyaan tidak relevan.

Terhadap Variabel Kualitas audit (Y) dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 47 orang (Lampiran 4), maka nilai r-tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = $n - k$. k merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel. Jadi $df = 47 - 6 = 41$, maka $r_{tabel} = 0,308$. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r hitung yang merupakan nilai dari corrected item total correlation > dari r tabel. Dari hasil output SPSS (Lampiran 8) terlihat semua butir pertanyaan tentang Kualitas audit memiliki kevaliditasan karena berada di atas nilai 0,308.

Tabel III.6 :
Analisis Hasil Uji Validitas Kualitas Audit

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Validitas
1	.806	0,308	Valid
2	.838	0,308	Valid
3	.752	0,308	Valid
4	.894	0,308	Valid
5	.790	0,308	Valid
6	.894	0,308	Valid

Tabel III.6 di atas dapat dilihat hasil uji validitas variabel kualitas audit, yang menunjukkan bahwa masing-masing indikator variabel yang telah diuji dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} (0,05). Dari tabel pengujian diketahui bahwa enam pernyataan dinyatakan valid dan telah memenuhi syarat validitas artinya ke-6 pernyataan tersebut relevan digunakan sebagai indikator independensi.

Berdasarkan uji validitas soal yang telah diujikan sebelumnya maka untuk variabel X_1 11 soal dapat diujikan kepada responden, sedangkan variabel X_2 ke 9 soal dapat diujikan, demikian juga untuk variabel Y secara keseluruhan 6 soal valid dan berhak diujikan. Selanjutnya akan diuraikan deskripsi masing-masing variabel

b. Uji Reabilitas

Reliabilitas alat ukur adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Artinya, kapan pun alat ukur tersebut digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama. Contoh paling nyata adalah timbangan atau meteran. Hal yang sama terjadi untuk alat ukur suatu gejala, tingkah laku, ciri atau sifat individu dan lain-lain. Misalnya alat ukur prestasi belajar seperti tes hasil belajar, alat ukur sikap, kuesioner dan lain-lain, hendaknya meneliti sifat keajegan tersebut.

Teknik statistic yang digunakan untuk pengujian tersebut dengan menggunakan koefisien *cronsbach's alpha* dengan bantuan SPSS. Secara umum suatu instrument dikatakan reliable jika memiliki koefisien *cronsbach's alpha* $> 0,6$. Rumus statistic untuk pengujian reabilitas adalah:

$$ri = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum S_b^2}{V_t^2} \right]$$

Keterangan:

r = reabilitas internal seluruh instrument

k = korelasi *product moment* antara belahan pertama dan belahan kedua.

Berdasarkan uji reabilitas diketahui keluaran data output SPSS terhadap uji reabilitas variabel X_1 (independensi) sebagaimana terlampir dalam Lampiran 6 menunjukkan tabel realibility statistic pada SPSS Ver. 22.0 yang terlihat sebagai Cronbach's Alpha 0,946 > 0,60. Dapat dikatakan bahwa konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel independensi (X_1) adalah reliabel.

Keluaran data output SPSS terhadap uji reabilitas variabel X_2 (Due profesional care) sebagaimana terlampir dalam Lampiran 7 menunjukkan tabel realibility statistic pada SPSS Ver. 22.0 yang terlihat sebagai Cronbach's Alpha 0,978 > 0,60. Dapat dikatakan bahwa konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel Due profesional care adalah reliabel. Sebagaimana hasil perhitungan SPSS diketahui bahwa:

Keluaran data output SPSS terhadap uji reabilitas variabel Y (kualitas audit) menunjukkan tabel reliability statistic pada SPSS Ver. 22.0 yang terlihat sebagai Cronbach's Alpha $0,979 > 0,60$ (Lampiran 8). Dapat dikatakan bahwa konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel Kualitas audit adalah reliabel.

G. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan uji statistik yang terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya setelah kuisioner di sebar, maka perlu dilakukan uji kualitas instrumen penelitian.

1. Statistik Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan cara merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, sehingga dapat diketahui gambaran umum dari objek yang diteliti. Menurut Sanusi (2011) peneliti dapat menggunakan statistik deskriptif apabila peneliti ingin menjelaskan data dari satu variabel yang diteliti. Menurut Azwar (2004) tujuan analisis deskriptif ini ialah “untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti”. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai data demografi responden (jenis kelamin, usia, jabatan/ posisi, lama bekerja) yang merupakan ukuran yang digunakan untuk mendeskripsikan frekuensi, tendensi sentral dan dispersi dengan skala pengukuran tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002).

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda

karena model yang diujikan memiliki lebih dari satu variabel independen yang mempengaruhi satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda ditujukan untuk menentukan hubungan linier antar beberapa variabel bebas yang biasanya disebut X1, X2, X3, dan satu variabel terikat yang disebut Y (Situmorang dan Lutfi, 2012). Data dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Audit

β = Koefisien Regresi

X1 = Independensi

X2 = *Due professional care*

A = Konstanta

e = *Standard error*

Untuk dapat melakukan analisis regresi linier berganda perlu pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan bermanfaat. Dalam membuat uji asumsi klasik harus menggunakan data yang akan digunakan dalam uji regresi. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastitas.

c. Uji Normalitas Data

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mendekati distribusi normal. Model yang paling baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji ini dilakukan melalui analisis *Kolmogorov Smirnov*. Dengan

menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05) maka nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* diatas nilai Signifikan 5% (0,05) artinya variabel residual berdistribusi normal (Situmorang,et.al, 2008:62).

d. Uji Multikolinearitas

Artinya variabel independen yang satu dengan yang lain dalam model regresi berganda tidak saling berhubungan secara sempurna. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Faktor*) melalui program SPSS. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai umum yang biasa dipakai adalah nilai *Tolerance* > 0,1 atau nilai VIF < 5, maka tidak terjadi multikoliolinaritas (Situmorang,et.al, 2008:73).

e. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama diantara anggota grup tersebut. Jika varians sama, dan ini yang seharusnya terjadi maka dikatakan sebagai homoskedastisitas, sedangkan jika varians tidak sama dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikan diatas tingkat kepercayaan 5% (0,05) dapat disimpulkan model regresi tidak mengarahkan heteroskedastisitas (Situmorang,et.al, 2008 :73).

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Ghozali, (2007) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan nilai residualnya dan dasar untuk menganalisanya adalah:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima. Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh independensi dan *due professional care* terhadap kualitas audit digunakan pengujian hipotesis dengan uji t dan uji F .

a. Uji t (Uji Parsial)

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen digunakan uji t . Dalam penelitian ini menguji apakah Independensi dan *Due Professional Care* terhadap kualitas audit.

Hipotesis di atas akan diuji berdasarkan daerah penerimaan dan daerah penolakan dengan tingkat signifikansi 5%, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Bila nilai signifikansi $t < 0.25$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila nilai signifikansi $t > 0.25$, maka H_0 diterima, artinya terdapat tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen

b. Uji F (Uji Simultan)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen.

Dengan tingkat signifikansi (sebesar 5%), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Bila nilai signifikan $F > 0.05$, maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen
- 2) Apabila nilai signifikan $F < 0.05$, maka H_0 diterima artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji besarnya persentase variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai *Adjusted R²* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2005). Rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

D : Determinasi

R^2 : Nilai Korelasi Berganda

100% : Persentase Kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Responden

a. Jenis Kelamin Responden

Untuk mengetahui jenis kelamin para responden yang dijadikan sampel penelitian, maka dapat dilihat dari uraian tabel berikut ini :

Tabel 4.1.

Jenis Kelamin Responden

No.	Keterangan	F	%
1.	P r i a	35	74,46
2.	Wanita	12	25,54
	Jumlah	47	100,00

Sumber : Penelitian 2017

Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa yang menjadi responden dalam penelitian ini pria lebih besar daripada wanita dimana pria sebesar 74,46%, sedangkan wanita sebesar 25,54%. Ini menandakan bahwa yang menjadi responden dalam penelitian ini lebih besar pria dibandingkan wanitanya. Hal ini sangat berhubungan dengan beban kerja dalam kaitannya dengan peran responden dalam penelitian ini.

b. Usia Responden.

Usia merupakan hal yang sangat mutlak dalam menentukan kondisi seseorang dalam bekerja. Dalam penelitian maka point yang pertama yang dipertanyakan tentang gambaran umum responden adalah usia.

Tabel 4.2.
Umur Responden

No.	Keterangan	F	%
1.	25 – 30	9	19,15
2.	31 – 35	13	27,66
3.	36 – 40	9	19,15
4.	41 – 45	8	17,02
5.	46 – 50	8	17,02
	Jumlah	47	100,00

Sumber : Penelitian 2017

Berdasarkan tabel di atas berkaitan dengan tingkat usia responden, maka dapat diketahui bahwa responden yang menjadi penelitian ini pada dasarnya memiliki karakteristik usia yang berimbang, dimana usia responden antara 25 – 30 sebanyak 19,15%, usia antara 31 – 35 tahun sebanyak 22,66%, usia antara 36 – 40 tahun sebanyak 19,15%, usia sebanyak 41 – 45 tahun sebanyak 17,02%, demikian juga yang berusia antara 46 – 50 tahun sebesar 17,02%.

c. Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan sangat menentukan terhadap kinerja seorang pegawai di suatu kantor atau perusahaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai, kinerjanya semakin baik sebaliknya pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah maka kinerjanya juga rendah.

Pendidikan terakhir para responden di BPK RI perwakilan Sumatera Utara dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.3.

Pendidikan Terakhir Responden

No.	Keterangan	F	%
1.	D-3	-	-
2.	S-1	37	78,72
3.		9	19,15
4.	S-2	1	2,13
	S-3		
	Jumlah	47	100,00

Sumber : Penelitian 2017

Tabel di atas memperlihatkan bahwa responden lebih besar yang berpendidikan S-1 yaitu sebesar 78,72%, sedangkan yang memiliki pendidikan terakhir S-2 sebesar 19,15%, dan sisanya S-3 sebesar 2,13%. Responden yang memiliki pendidikan D-3 dalam penelitian ini tidak ada.

d. Lama bekerja

Lama bekerja para responden dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.4.

Lama Bekerja Responden

No.	Keterangan	F	%
1.	di bawah 3 tahun	4	8,51
2.	4 tahun	12	25,53
3.	5 tahun	17	36,18
4.	6 tahun ke atas	14	29,79
	Jumlah	47	100,00

Sumber : Penelitian 2017

Tabel di atas memperlihatkan lama kerja responden di bawah 3 tahun sebesar 8,51%, selama 4 tahun sebesar 25,53%, 5 tahun sebesar 36,18% dan sisanya 6 tahun ke

atas sebesar 29,79%.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Independensi (X_1)

Tanggapan responden terhadap pertanyaan variabel Independen (X_1) dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5.
Deskripsi Independensi

No Item	SS		S		KS		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	30	64%	8	17%	2	4%	7	15%	-	-
2	8	17%	33	70%	6	12%	-	-	-	-
3	22	46%	12	25%	2	4%	7	15%	-	-
4	30	64%	8	17%	2	4%	7	15%	-	-
5	30	64%	8	17%	2	4%	7	15%	-	-
6	9	19%	30	64%	8	17%	-	-	-	-
7	9	19%	33	70%	5	11%	-	-	-	-
8	26	55%	8	17%	5	11%	7	15%	-	-
9	26	55%	8	17%	5	11%	7	15%	-	-
10	9	19%	31	65%	6	12%	-	-	-	-
11	9	19%	31	65%	6	12%	-	-	-	-
Jumlah	208		210		49		14		-	
Rata-rata	44,2		44,6		1,04		2,97			

Sumber : Hasil Penelitian Data Diolah 2017

Berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat dideskripsikan bahwa :

1. Dari 47 responden, 64% menyatakan sangat setuju tentang independensi BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara, 17% menyatakan setuju, 15% menyatakan tidak setuju dan 4% menyatakan kurang setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPK RI Propinsi Sumatera Utara memiliki independensi dalam

menjalankan tugasnya dengan bebas dari intervensi manajerial dalam menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu dalam audit.

2. Dari 47 responden 70% menyatakan sangat setuju, 17% menyatakan setuju dan 12% menyatakan kurang setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa independensi BPK RI Propinsi Sumatera Utara terhadap pelaksanaan pemeriksaan, bebas dari intervensi pihak lain untuk menyusun prosedur yang dipilih.
3. Dari 47 responden, 46% menyatakan sangat setuju, 25% menyatakan setuju, 15% menyatakan tidak setuju dan 4% menyatakan kurang setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa independensi BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara bebas dari usaha-usaha pihak lain untuk menentukan subjek pemeriksaan.
4. Dari 47 responden, 64% menyatakan sangat setuju, 17% menyatakan setuju, 15% menyatakan tidak setuju dan 4% menyatakan kurang setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa independensi BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara dapat langsung dan bebas mengakses informasi yang berhubungan dengan kegiatan, kewajiban dan sumber-sumber bisnis auditee.
5. Dari 47 responden, 64% menyatakan setuju , 17% menyatakan setuju, 15% menyatakan tidak setuju dan 4% menyatakan kurang setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa independensi BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara mampu bekerjasama dengan manajerial secara aktif dalam proses pemeriksaan.
6. Dari 47 responden, 64% menyatakan setuju, 17% menyatakan kurang setuju dan 19% menyatakan setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa independensi BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara bebas dari upaya manajerial perusahaan untuk menetapkan kegiatan apa saja yang akan diperiksa.

7. Dari 47 responden, 70% menyatakan setuju, 19% menyatakan sangat setuju dan 11% menyatakan tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa independensi BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain yang dapat membatasi kebebasan pemeriksaan.
8. Dari 47 responden, 55% menyatakan sangat setuju, 17 % menyatakan setuju, 15% menyatakan tidak setuju dan 11% menyatakan kurang setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa independensi BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara berusaha menghindari praktik yang dapat menghilangkan kejadian yang penting dalam laporan formal.
9. Dari 47 responden, 55% menyatakan sangat setuju, 17% menyatakan setuju, 15% menyatakan tidak setuju dan 11% menyatakan kurang setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa independensi BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara terhadap pelaporan hasil audit yang dilaporkan bebas dari bahasa yang dapat menimbulkan multi tafsir.
10. Dari 47 responden, 65% menyatakan setuju, 19% menyatakan sangat setuju, dan 6% menyatakan kurang setuju. Berdasarkan hasil jawaban responden dapat disimpulkan bahwa independensi BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara menunjukkan tidak ada usaha pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap isi laporan.
11. Dari 47 responden, 65% menyatakan setuju, 19% menyatakan sangat setuju dan 12% menyatakan kurang setuju. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa independensi BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara terlihat bebas dari kepentingan pihak lain untuk memodifikasi pengaruh fakta-fakta yang dilaporkan.

b. Due Professional Care

Untuk mengetahui tentang profesionalisme dari BPK RI perwakilan Sumatera Utara maka dapat diketahui berdasarkan hasil tabel berikut :

Tanggapan responden terhadap pertanyaan variabel *Due professional Care* (X_2) dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Deskripsi Profesionalisme

No Item	SS		S		KS		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	26	53%	14	29%	4	8%	3	6%	-	-
2	25	53%	14	29%	4	8%	4	8%	-	-
3	26	53%	12	25%	6	12%	3	6%	-	-
4	26	53%	14	29%	4	8%	3	6%	-	-
5	23	49%	17	36%	4	8%	3	6%	-	-
6	30	64%	11	23%	2	4%	4	8%	-	-
7	21	45%	18	38%	5	11%	3	6%	-	-
8	20	42%	17	36%	7	15%	3	6%	-	-
9	26	53%	14	29%	4	8%	3	6%	-	-
Jumlah	223		131		40		29		-	
Rata-rata	47,4		2,78		8,51		6,17			

Sumber : Hasil Penelitian Data Diolah 2017

Berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat dideskripsikan bahwa :

1. Dari 47 responden, 53% menyatakan sangat setuju tentang profesionalisme BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara, 14% menyatakan setuju, 4% menyatakan kurang setuju dan 3% menyatakan tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPK RI Propinsi Sumatera Utara memiliki profesionalisme dengan melakukan penilaian yang kritis, tidak menerima informasi begitu saja.
2. Dari 47 responden 25% menyatakan sangat setuju, 14% menyatakan setuju dan 4%

menyatakan kurang setuju dan 4% menyatakan tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesionalisme BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara dimana terus menerus bertanya dan mempertanyakan informasi yang ada selama pemeriksaan.

3. Dari 47 responden, 53% menyatakan sangat setuju, 25% menyatakan setuju, 12% menyatakan kurang setuju dan 6% menyatakan tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa profesionalisme BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara menunjukkan selalu berusaha melakukan penyusunan audit yang dilakukan bebas dari usaha-usaha pihak lain untuk menentukan subjek pemeriksaan.
4. Dari 47 responden, 53% menyatakan sangat setuju, 14% menyatakan setuju, 8% menyatakan kurang setuju dan 6% menyatakan tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa profesionalisme BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara menunjukkan berusaha membuktikan kesahihan dari bukti audit yang diperoleh.
5. Dari 47 responden, 49% menyatakan sangat setuju, 36% menyatakan setuju, 8% menyatakan kurang setuju dan 6% menyatakan tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa profesionalisme BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara menunjukkan dengan mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain selama pemeriksaan.
6. Dari 47 responden, 64% menyatakan sangat setuju, 23% menyatakan setuju dan 4% menyatakan kurang setuju dan 8% menyatakan tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa profesionalisme BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara menunjukkan sikap dapat dipercaya dalam mengaudit laporan keuangan.
7. Dari 47 responden, 45% menyatakan sangat setuju, 38% menyatakan setuju dan

11% menyatakan kurang setuju dan 6% menyatakan tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa profesionalisme BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa secara terus menerus berupaya meningkatkan keahlian dan keefektifan dalam menjalankan tugas melalui pendidikan profesi berkelanjutan.

8. Dari 47 responden, 42% menyatakan sangat setuju, 36% menyatakan setuju, 15% menyatakan kurang setuju dan 6% menyatakan tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa profesionalisme BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa berusaha untuk menghindari praktik yang dapat menghilangkan kejadian yang penting dalam laporan formal.
9. Dari 47 responden, 53% menyatakan sangat setuju, 29% menyatakan setuju, 8% menyatakan kurang setuju dan 3% menyatakan tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa profesionalisme BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan mempunyai kehati-hatian dalam mengaudit laporan keuangan.

c. Kualitas Audit (Variabel Y)

Untuk mengetahui tentang kualitas audit dari BPK RI perwakilan Sumatera Utara maka dapat diketahui berdasarkan hasil tabel berikut :

Tanggapan responden terhadap pertanyaan variabel kualitas audit (Y) dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.7
Kualitas Audit

No	SS	S	KS	TS	STS
----	----	---	----	----	-----

Item	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	25	53%	11	23%	4	8%	7	15%	-	-
2	18	38%	16	34%	4	8%	9	19%	-	-
3	27	57%	8	17%	5	11%	7	15%	-	-
4	19	40%	15	31%	5	11%	8	17%	-	-
5	29	62%	9	19%	2	4%	7	15%	-	-
6	20	53%	13	28%	4	8%	10	21%	-	-
Jumlah	138		72		24		48		-	
Rata-rata	29,3		1,53		5,10		1,02			

Sumber : Hasil Penelitian Data Diolah 2017

Berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat dideskripsikan bahwa :

1. Dari 47 responden, 53% menyatakan sangat setuju tentang kualitas audit BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara, 23% menyatakan setuju, 8% menyatakan kurang setuju dan 15% menyatakan tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPK RI Propinsi Sumatera Utara memiliki profesionalisme dalam kualitas audit terbukti karena selalu melakukan upaya untuk mengembangkan pengetahuan yang akan membantu dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan bidang pemeriksaan.
2. Dari 47 responden 38% menyatakan sangat setuju, 34% menyatakan setuju dan 19% menyatakan tidak setuju dan 8% menyatakan kurang setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas audit BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara terbukti dengan menggunakan cara tersendiri untuk mendeteksi kesalahan dalam pemeriksaan.
3. Dari 47 responden, 57% menyatakan sangat setuju, 17% menyatakan setuju, 15%

menyatakan tidak setuju dan 11% menyatakan kurang setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas audit BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara dibuktikan dengan kemampuan mendeteksi adanya kesalahan setiap kali melakukan pemeriksaan.

4. Dari 47 responden, 40% menyatakan sangat setuju, 31% menyatakan setuju, 17% menyatakan tidak setuju dan 11% menyatakan kurang setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas audit BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara menunjukkan sebagai auditor melihat rutin melakukan pelatihan.
5. Dari 47 responden, 62% menyatakan sangat setuju, 19% menyatakan setuju, 15% menyatakan tidak setuju dan 4% menyatakan kurang setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas audit BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara menunjukkan selalu melaporkan tentang adanya pelanggaran kepada atasan.
6. Dari 47 responden, 53% menyatakan sangat setuju, 28% menyatakan setuju dan 21% menyatakan tidak setuju dan 8% menyatakan kurang setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas audit BPK RI perwakilan Propinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa laporan hasil audit memuat temuan dan simpulan hasil audit secara objektif.

Selanjutnya pengujian asumsi klasik dilakukan dengan pengambilan data jumlah dari variable X_1 , X_2 dan variable Y

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Selanjutnya akan dilakukan uji normalitas data atas keseluruhan variable dengan menghitung berdasarkan SPSS. Normalitas data dapat dilihat dengan cara melihat nilai Skewness. Nilai Skewness yang baik adalah mendekati angka 0.

Tabel 4.8: Test of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Independensi	,252	47	,000	,797	47	,000
Due Professional Care	,207	47	,000	,784	47	,000
Kualitas Audit	,197	47	,000	,782	47	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Output di atas menjelaskan tentang hasil uji normalitas dengan metode Lilliefors dengan Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan metode Komogorov-Smirnov maka nilai sig (signifikansi) kurang dari 0,05, sehingga dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa data yang disajikan tidak berdistribusi secara normal. Hal ini disebabkan nilai signifikansi untuk variabel independensi, due professional care dan kualitas audit berada di bawah nilai signifikansi 0,05.

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi) atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. Konsekuensi adanya multikolineritas adalah koefisien korelasi tidak tertent dan kesalahan menjadi sangat besar.

Pada penelitian ini metode uji multikolineritas diajukan dengan melihat nilai tolerance dan inflation faktor (VIF) pada model regresi

Tabel 4.9: Coefficients a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4,714	5,153		-,915	,365		
Independensi	,595	,077	,764	7,687	,000	,980	1,020
Due Professional Care	,056	,083	,067	,674	,504	,980	1,020

a. Dependent Variable: Kualitas Audit

Hasil uji melalui variance inflation factor (VIF) pada hasil output SPSS tabel *Coefficients*, masing-masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1. Maka dapat dinyatakan model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik statistik dan dapat digunakan dalam penelitian.

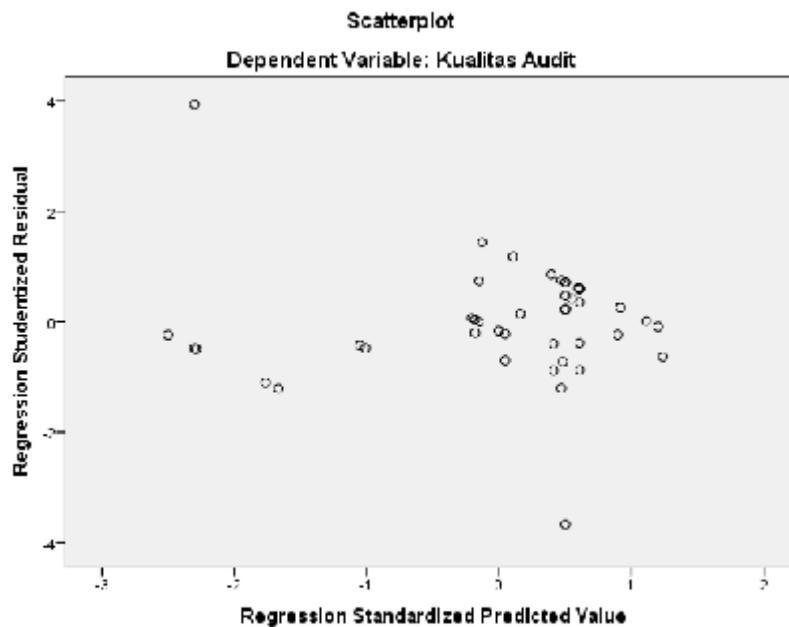
c. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas atau homogenitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized Delete Residual* nilai tersebut. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain, atau adanya hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized Delete Residual* nilai tersebut sehingga dapat dikatakan model tersebut homokedastisitas.

Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot* model tersebut. Analisis pada gambar *Scatterplot* yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

- a) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- c) Penyebaran titik-titik data tidak boleh menyentuh pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.

Hasil output SPSS menunjukkan:



Gambar 4.1. Scatterplot

Output SPSS pada gambar Scatterplot menunjukkan penyebaran titik-titik data sebagai berikut:

- a) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- c) Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.

d) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda dari asumsi klasik Heteroskedastisitas atau homogenitas dan layak digunakan dalam penelitian.

B. Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Uji Regresi Berganda yang akan dilakukan terhadap pengaruh independensi dan Due profesional Care terhadap kualitas audit dilakukan berdasarkan model persamaan satu jalur. Model persamaan satu jalur ini terdiri dari dua variabel bebas yaitu independensi dan Due profesional care dan satu variabel terikat yaitu kualitas audit .

Tabel 4.10. Coefficients b

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4,714	5,153		-,915	,365		
Independensi	,595	,077	,764	7,687	,000	,980	1,020
Due Professional Care	,056	,083	,067	,674	,504	,980	1,020

a. Dependent Variable: Kualitas Audit

Persamaan struktural untuk diagram jalur di atas adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = -4,714 + 0,595 X_1 + 0,056 X_2$$

Keterangan:

Nilai Konstanta (a) sebesar -4,714 menyatakan bahwa jika independensi dan due profesional care nilainya adalah 0, maka kualitas audit adalah -4,714.

Nilai koefisien regresi independensi (b_1) bernilai positif, yaitu 0,595. Ini dapat diartikan setiap peningkatan independensi sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan independensi sebesar 0,595 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Nilai koefisien regresi variabel due professional care (b_2) bernilai positif, yaitu 0,056. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan due professional care sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan due professional care sebesar 0,056 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel independensi dan Due profesional care terhadap kualitas audit secara sendiri-sendiri/parsial, dipergunakan uji t, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh, digunakan angka Beta atau Standardized Coefficient sebagaimana disebut dalam tabel 4.8 di atas.

1) Pengaruh antara independensi dengan kualitas audit .

Untuk melihat apakah ada pengaruh antara independensi terhadap kualitas audit maka dapat dilakukan langkah sebagai berikut:

Menentukan hipotesis:

H_0 : Tidak ada pengaruh antara independensi dengan kualitas audit.

H_1 : Ada pengaruh antara independensi dengan kualitas audit.

Tingkatan selanjutnya adalah menghitung besarnya angka t penelitian.

Hasil perhitungan SPSS di atas diperoleh angka t penelitian sebesar 7,687

Nilai t hitung di atas akan diperbandingkan dengan nilai t tabel. Pada taraf signifikansi 0,25 dan derajat kebebasan (dk) dengan ketentuan $dk = n - 2$ atau $47 - 2 = 45$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t tabel sebesar 2,014.

Untuk memperbandingkannya maka ditentukan kriteria:

Jika t penelitian $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Jika t penelitian $<$ t tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Didasarkan hasil perhitungan diperoleh angka t penelitian sebesar $7,687 >$ t tabel 2,014 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh antara independensi terhadap kualitas audit.

2) Pengaruh antara Due profesional care dengan kualitas audit.

Untuk melihat apakah ada pengaruh antara Due profesional care dengan kualitas audit maka dapat dilakukan langkah sebagai berikut:

Menentukan hipotesis:

H_0 : Tidak ada pengaruh antara Due profesional care dengan kualitas audit .

H_1 : Ada pengaruh antara Due profesional care dengan kualitas audit .

Tingkatan selanjutnya adalah menghitung besarnya angka t penelitian.

Hasil perhitungan SPSS di atas diperoleh angka t penelitian sebesar 0,674

Nilai t hitung di atas akan diperbandingkan dengan nilai t tabel. Pada taraf signifikansi 0,25 dan derajat kebebasan (dk) dengan ketentuan $dk = n - 2$ atau $47 - 2 = 45$ Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t tabel sebesar 2,014.

Untuk memperbandingkannya maka ditentukan kriteria:

Jika t penelitian $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Jika t penelitian $<$ t tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Didasarkan hasil perhitungan diperoleh angka t penelitian sebesar $0,674 < t$ tabel 2,014 maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh antara due profesional care terhadap kualitas audit .

b. Uji Simultan (Uji F).

Tabel 4.11.: ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1027,333	2	513,667	29,626	,000 ^b
	Residual	762,879	44	17,338		
	Total	1790,213	46			

a. Dependent Variable: Kualitas Audit

b. Predictors: (Constant), Due Professional Care, Independensi

Dari hasil output di atas diketahui F penelitian adalah sebesar 29,626

Derajat kebebasan (DK) dengan ketentuan numerator, jumlah variabel – 1 atau $3 - 1 = 2$ dan denumerator, jumlah sampel – 4 atau $47 - 4 = 43$ Dengan ketentuan tersebut diperoleh angka F tabel sebesar 3,214.

Untuk melakukan pengujian selanjutnya maka ditentukan kriteria uji hipotesis sebagai berikut:

Jika F penelitian $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Jika F penelitian $<$ F tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dari hasil perhitungan didapatkan angka F penelitian sebesar $29,626 >$ F Tabel sebesar 3,214 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, ada pengaruh antara independensi dan Due profesional care dengan kualitas audit . Dengan demikian model regresi di atas sudah layak dan benar. Kesimpulannya adalah independensi dan Due profesional care secara gabungan mempengaruhi kualitas audit .

c. Koefisien Determinasi

Pada bagian awal ini akan dilihat pengaruh Kualitas independensi dan Due

profesional care terhadap kualitas audit. Untuk melihat pengaruh variabel Kualitas independensi dan Due profesional care terhadap kualitas audit, akan dilihat hasil perhitungan dalam model summary, khususnya angka R, Square di bawah ini:

Tabel 4.12.: Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,758 ^a	,574	,554	4,164	2,740

a. Predictors: (Constant), Due Professional Care, Independensi

b. Dependent Variable: Kualitas Audit

Besarnya angka R square (r^2) adalah 0,574. Angka tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh independensi dan Due profesional care terhadap kualitas audit dengan cara menghitung koefisien dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,574 \times 100\%$$

$$KD = 57,4\%$$

Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh independensi dan Due profesional care terhadap kualitas audit secara gabungan adalah 57,4%, sedangkan sisanya adalah sebesar 42,6% (100% - 57,4%) dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain variabilitas kualitas audit yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel independensi dan Due profesional care adalah 57,4%, sedangkan 42,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

C. Pembahasan

Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, setelah dikumpulkan dan diolah maka dapat diketahui bahwa :

1. Analisa Deskripsi Variabel Penelitian

Berdasarkan deksripsi hasil tabel yang telah diuraikan sesuai dengan masing-masing variabel maka dapat dianalisa bahwa :

- a. Tanggapan responden berkaitan dengan independent menunjukkan bahwa dari 11 pertanyaan mayoritas menjawab sangat setuju dan setuju. Hal ini terlihat dari jumlah jawaban SS = 209 dan S = 210 dengan jumlah persentase keseluruhan adalah 44,2% dan 44,6% yaitu 88,8%
- b. Adapun tanggapan responden terhadap profesionalisme kerja pegawai BPK menunjukkan mayoritas sangat setuju 223 dan setuju 131 dari 9 pertanyaan yang diajukan dengan jumlah persentase 47,4 dan 2,78% dengan jumlah keseluruhan 57,2% menyatakan bahwa kerja BPK cukup professional.
- c. Demikian juga jawaban responden terhadap kualitas audit BPK menunjukkan bahwa mayoritas responden dengan jumlah 138 mengatakan sangat setuju dan 72 mengatakan setuju dengan rata-rata 29,3% dan 1,53% dengan jumlah keseluruhan 30,56. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit BPK cukup baik.

2. Analisa Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

Independensi pegawai BPK berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini dapat dilihat berdasarkan perhitungan dimana uji hipotesis yang dilakukan pada X_1 melalui uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung adalah 7,687 sedangkan t-tabel adalah 2,014, ini menunjukkan bahwa $7,687 > 2,014$. Karena t-hitung lebih besar dari t-tabel berarti terdapat pengaruh antara independensi terhadap kualitas audit.

Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t penelitian sebesar 7,687. Nilai t hitung di atas akan diperbandingkan dengan nilai t tabel. Pada taraf signifikansi 0,25 dan derajat kebebasan (dk) dengan ketentuan $dk = n - 2$ atau $47 - 2 = 45$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t tabel sebesar 2,014.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka t penelitian sebesar $7,687 > t$ tabel 2,014 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh independensi terhadap kualitas audit.

Berkaitan dengan segala pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simultan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak kepada pihak manapun.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Deva Avrianti (2010), Annisa Desti Puspatriani (2016) yang menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap terhadap kualitas audit.

Berdasarkan temuan penulis di lapangan dan dari berbagai sumber persoalan independensi auditor masih menjadi sorotan, disebabkan masih banyaknya kasus-kasus yang melibatkan para auditor yang berkenaan dengan masalah independensi auditor. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilaksanakan, apabila seorang auditor tidak independen dalam melaksanakan proses audit tentu hasil audit yang dilaksanakan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Pengaruh due professional care terhadap kualitas Audit

Tingkatan selanjutnya adalah menghitung besarnya angka t penelitian. Hasil perhitungan SPSS terhadap dua professional care diperoleh angka t penelitian sebesar 0,674. Nilai t hitung di atas akan diperbandingkan dengan nilai t tabel. Pada taraf signifikansi 0,25 dan derajat kebebasan (dk) dengan ketentuan $dk = n - 2$ atau $47 - 2 = 45$ Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t tabel sebesar 2,014.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka t penelitian sebesar $0,674 < t$ tabel 2,014 maka H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh antara due profesional care terhadap kualitas audit .

Sedangkan uji hipotesis terhadap X₂ menunjukkan bahwa r-hitung adalah 0,674 sedangkan t-tabel adalah 2,014 ($0,674 < 2,014$) atau r-hitung lebih kecil dari pada r-tabel. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara profesionalisme terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat De Abnfelo (2013) bahwa kemungkinan (*Probability*) dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (*Due Profesional Care*). IAI menyatakan bahwa ada lima indikator yang digunakan untuk mengukur *Due Profesional Care* antara lain yaitu : menggunakan kecermatan dan keterampilan dalam bekerja, memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab, kompeten dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan adanya kemungkinan terjadi kesalahan, ketidakteraturan dan ketidak patuhan.

Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap *Due Profesional Care* sudah berjalan dengan baik, namun kelihatannya masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan untuk efektivitas dan efisiensi dalam menuntaskan permasalahan yang ada di Sumatera Utara.

4. Pengaruh Independensi dan *due professional care* terhadap kualitas audit

Berdasarkan uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi independensi (b_1) bernilai positif yaitu 0,595 lebih besar dari -4,714 *due professional care* hal ini menunjukkan terjadi peningkatan atau independensi pegawai BPK positif. Sedangkan nilai koefisien regresi variabel (b_2) adalah 0,056 sedangkan *due professional care* adalah -4,714 dan ini menunjukkan bahwa profesionalisme kerja BPK cukup baik.

Melalui uji simultan (Uji F) terlihat bahwa *f*-hitung adalah sebesar 29,626 sedangkan *F*-tabel adalah 3,214 hal ini menunjukkan bahwa *F*-hitung lebih besar dari *F*-tabel ($29,626 > 3,214$) berarti terdapat pengaruh secara bersama-sama antara independensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit di BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

Selanjutnya melalui uji determinasi diketahui bahwa adalah 57,4% hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengaruh antara independensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit di BPK RI Perwakilan Medan sebanyak 57% dengan demikian terdapat pengaruh yang positif antara variabel X_1 dan X_2 terhadap kualitas audit (Y) namun pengaruh yang ditimbulkan tidak signifikan. Dengan kata lain variabilitas kualitas audit yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel independensi dan *Due professional care* adalah 57,4%, sedangkan 42,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Desty Puspatriani (2016) yang menyatakan independensi dan *due professional care* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Kualitas audit sangat bergantung pada *due professional care* yang dimiliki oleh seorang auditor apabila seorang auditor memiliki *due professional care* yang baik tentunya akan baik pula, disamping itu seorang auditor juga harus bersikap netral dan independen dengan tidak berpihak pada siapa pun juga, karena apabila sikap ini tidak dimiliki seorang auditor maka *due professional care* yang ada tidak ada artinya, seorang auditor tidak akan lagi mampu memperhatikan prosedur audit sesuai dengan *due professional care* yang dimilikinya.

Berdasarkan temuan penulis di lapangan independensi auditor masih menjadi sorotan, disebabkan masih banyaknya kasus-kasus yang melibatkan para auditor yang berkenaan dengan masalah independensi auditor. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang akan dilaksanakan, apabila seorang auditor tidak independen dalam melaksanakan proses audit tentu hasil audit yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab terdahulu maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah:

1. Independensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menjelaskan independensi yang diterapkan di BPK Medan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan dalam meningkatkan kualitas audit.
2. Due profesional care tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menjelaskan bahwa Due profesional care yang diterapkan di BPK Medan sudah berjalan secara baik dan berpengaruh terhadap kualitas audit di BPK Medan.
3. Independensi dan Due profesional care memiliki pengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Dengan kata lain variabilitas kualitas audit yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel Kualitas independensi dan Due profesional care. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa independensi dan Due profesional care yang diterapkan di BPK Medan telah berjalan baik dan mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas audit .

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan meliputi:

1. Meskipun independensi di BPK Medan sudah berjalan dengan baik tetapi keadaan tersebut perlu ditingkatkan lagi sehingga menjadi lebih baik.

2. Disebabkan Due profesional care tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit pada BPK Medan, hendaknya BPK Medan meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas audit di BPK Medan.
3. BPK Medan juga hendaknya tetap memperhatikan hal-hal lainnya di luar independensi dan Due profesional care, karena variabel-variabel tersebut juga turut serta memberikan kontribusi bagi kualitas audit di BPK Medan dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, 2008. *Auditing: (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik Jilid I*. Edisi ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Badjuri, Achmat. *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kualitas Audit Auditor Independen pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3 No. 2. Hal: 183 – 197. 2011
- Fauzi Nugraha, A Basit. 2013. *Pengaruh Pengalaman, Due professional care, Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Survey pada Auditor Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat)*. Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing:Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan. Jilid 1, Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Herawaty. *Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due professional care dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit*. *Jurnal Binar Akuntansi*. Vol.1 No.1. 2012
- Muh Taufiq, Efendy. 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Gorontalo)*. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Restu, Agusti dan Nastia Putri. 2013. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik Se-Sumatera)*. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* Vol. 21. Riau
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta.
- Sudjana. 2005.*Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Suliyanto. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset
- Uma, Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Zalida, Fera, Afni, Sriyunianti dan Afridian Wirahadi Ahmad. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Vol. 7 No. 2. Hal 69-77. 2012.

Audit BPK bukan untuk mencari-cari kesalahan melalui <https://amp.kaskus.co.id/thread/5710c05396bde6045c8b4572/audit-bpk-bukan-untuk-mencari-cari-kesalahan>

DPRD PROVSU mendesak BPK Sumut untuk melakukan audit proyek bantuan keuangan provinsi (BKP) TA 2015 sebesar 7 miliar melalui <http://www.tobasatu.com/2016>